

**UPAYA PEMERINTAH UGANDA DALAM MENGATASI PEMBERONTAK LRA
(LORD'S RESISTANCE ARMY) PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN YOWERI
MUSEVENI (2006-2011)**

Oleh:

AL PUSRAT

poes.al@gmail.com

Pembimbing : Saiman Pakpahan, S.IP. M.Si

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional - Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Telp. (0761) 63267 Fax. (0761) 65804

ABSTRACT

The effort by the Government of Uganda to solve the rebel LRA (Lord's Resistance Army) during the reign of President Yoweri Museveni (2006-2011). The conflict between the Government of Uganda and the LRA rebels have caused deaths of more than 24,000 people of Uganda, the Democratic Republic of Congo, the Central African Republic, and Southern Sudan. Finally, the government of Uganda as the origin of the LRA rebels, making policy with military attacks, negotiations, and even some support from the African Union and the United Nations. The concepts used in this research is the National Interest by Donald E. Nuchterlaein and supporting theory used is the Social Movement theory by Stouffer. To solve these problems, the government of Uganda made several efforts including negotiations and ask for the support of the International. In the negotiation process, the government of Uganda entered into an agreement known as the Juba Talks, Uganda is also working with countries that border Southern Sudan, the Democratic Republic of Congo, the Central African Republic as well as international organizations such as the African Union and the United Nations.

Key Words: Conflict, Military Operations, Negotiation, Rebels, National Interest.

Pendahuluan

Konflik ini berawal dari kesenjangan yang dirasakan etnis Acholi terhadap etnis Baganda, yang masing-masing mendiami daerah utara dan selatan di wilayah Uganda. Pada masa penjajahan Inggris, kedua daerah ini memiliki posisi yang berbeda. Etnis Baganda memiliki kedudukan dalam pendidikan, ekonomi, dan posisi-posisi

strategis dalam pemerintahan, sedangkan Acholi hanya menempati posisi dalam bidang perekonomian (sumber bahan baku) dan sebagai tentara. Sehingga muncullah berbagai kelompok gerakan dan pemberontakan, salah satu yang paling menonjol adalah kelompok LRA (*Lord's Resistance Army*) atau Tentara Perlawanan Tuhan.

LRA yang merupakan kelompok anti pemerintah itu sudah lama terbentuk oleh keyakinan (ideologi), bahwa untuk mengangkat senjata demi mewujudkan berdirinya rezim teokratis atau pemerintah berbasis agama di Uganda. Sementara itu, pemerintahan Uganda yang dipimpin oleh presiden Yoweri Museveni bertindak untuk menangani pemberontakan tersebut. Yoweri Museveni untuk pertama kalinya menjadi presiden Uganda pada 29 Januari 1986¹. Kemudian terpilih secara demokratis dalam pemilihan umum presiden yaitu pada tahun 1996, 2001, 2006 dan 2011 hingga sekarang.

Pada awal tahun 1987, Joseph Kony membentuk LRA atau Tentara Perlawanan Tuhan. LRA berupaya untuk menjatuhkan pemerintah Uganda saat itu. Sehingga terjadi konflik antara pemerintah dengan kelompok LRA. Pada tahun 2006, konflik ini meningkat (eskalasi) ketika pemberontak LRA tidak menuruti perjanjian damai *Juba Peace Talks*. Sejak saat itu, konflik tidak dapat dihindari, menyebar ke wilayah Negara-negara perbatasan Uganda dan menjadi perhatian internasional.

Konflik yang berkepanjangan antara pemerintah Uganda dan LRA menjadi sorotan dunia internasional. Berbagai kelompok di Uganda utara, beberapa negara yakni Republik Demokrasi Kongo (RDK), Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan, terutama pemimpin agama dan pemuka adat, terus menekan untuk melakukan perundingan. Mereka mendesak bahwa lebih diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk komitmen baru untuk mencari solusi damai. Tekanan dari dunia internasional mendorong pemerintah

Uganda untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian konflik.²

Pemerintah Uganda memberikan reaksi terhadap tindakan tersebut untuk mengatasi korban warga sipil bertambah. Beberapa kebijakan pun dilakukan terhadap pemberontakan yang berkepanjangan sejak tahun 1986 ini. Maka dunia internasional melalui Uni Afrika dan DK PBB ikut serta dalam penanganan masalah ini serta Negara-negara tetangga seperti Republik Demokratik Kongo (RDK), Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan juga berperan aktif dalam kebijakan mengatasi permasalahan pemberontak tersebut.

Pada masa pemerintahan presiden Yoweri Museveni di Uganda periode tahun 2006 hingga tahun 2011, berbagai kebijakan untuk menangani kelompok LRA ini telah banyak diterapkan. Mulai dari gencatan senjata, serangan militer, penangkapan, perjanjian dan bekerjasama dengan pihak bersengketa dan organisasi regional maupun internasional. Oleh karena itu pula, adanya perjanjian damai seperti *Juba Talks* (2006) dan resolusi-resolusi DK PBB seperti *Resolusi 1812* (tahun 2008), *Resolusi 1991* (tahun 2011), dan *Resolusi 1996* (tahun 2011). Demikian itu merupakan bentuk upaya konkrit pemerintah Uganda dalam menangani kelompok LRA tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Negosiasi *Juba Talks* Tahun 2006-2008

Negosiasi *Juba Talks* adalah suatu kesepakatan damai antara kelompok pemberontak LRA dengan pemerintah Uganda yang terjadi selama tahun 2006

¹ State House of Uganda, *The President*. Dikutip dari: <http://www.statehouse.go.ug/people/h-e-yoweri-k-museveni> Pada 10 September 2013.

² Hendrickson dan Kennedy Tumutegereize, *Dealing with Complexity in Peace Negotiations: Reflections on the Lord's Resistance Army and the Juba talks*. Conciliation Resources, 2012. Hal 5.

hingga tahun 2008. Ada kemungkinan bahwa Kony merasa kapasitas LRA telah menurun drastis akibat beberapa serangan ataupun operasi militer, sehingga Joseph Kony menginisiasi sebuah proses perdamaian melalui negosiasi ini. Negosiasi tersebut dikenal sebagai *Juba Talks*.

Negosiasi *Juba Talks* dimediasi oleh wakil presiden Sudan Riek Machar, yang berlangsung dari bulan Juni 2006 di wilayah Sudan Selatan. *Juba Talks* sesi pertama menghasilkan sebuah gencatan senjata pada September 2006, dan waktu itu merupakan sebuah kemajuan pesat jika dibandingkan dengan usaha-usaha damai lainnya. Sehingga perundingan itu menjadi harapan besar bagi rakyat maupun semua Negara yang terkena dampak langsung kelompok pemberontak ini.

Tujuan utama dari upaya yang komprehensif ini adalah untuk mengakhiri perang di Uganda dan untuk memecahkan masalah kehadiran LRA di Uganda dimulai pada tahun 2006. Kedua belah pihak telah membuat tawaran. Pada rentang waktu tahun 2005 hingga 2006, LRA telah melakukan kontak dengan organisasi internasional untuk mengumpulkan dukungan dilakukannya pembicaraan damai. Hal ini menyebabkan pertemuan pertama antara perwakilan Kony dan Machar dekat perbatasan Kongo pada tanggal 3 Mei 2006.

Akan tetapi, pembicaraan damai belum juga menempuh awal yang menjanjikan dan dukungan internasional lemah. Pada masa itu, pihak-pihak terkait hanya menunjukkan sedikit kepercayaan terhadap Machar, yang dianggap menggunakan peran mediator untuk memperkuat kekuasaannya di Sudan Selatan. Dan juga, kelompok LRA tidak memiliki kredibilitas sebagai mitra negosiasi, dan karena Mahkamah Pidana

Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) menjelang akhir tahun 2004, konflik antara pemerintah Uganda dan LRA diakui oleh ICC merupakan konflik internasional, dan pada tahun 2005 ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk lima komandan LRA.³

Kelompok LRA berulang kali menyatakan bahwa proses perdamaian tidak aman dan hasil akhir yang bias terhadap kelompoknya. Kemajuan dalam enam bulan pertama perundingan itu sangat lambat. Sudan Selatan sebagai fasilitator, telah berjuang untuk menciptakan ruang netral untuk perdebatan, bukan hanya karena kepentingan besar yang terlibat, tetapi juga karena merupakan operasi pemerintah baru (pemisahan dari Negara Sudan) dalam lingkungan keamanan yang belum sepenuhnya stabil.

Sementara itu, dukungan pemerintah Sudan (Gos) untuk LRA melemah setelah Khartoum, ibukota Sudan, menandatangani Perjanjian Perdamaian Komprehensif (CPA) dengan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) pada Januari 2005. CPA menyebabkan penciptaan pemerintah semi-otonom Sudan Selatan (Goss), yang memiliki kepentingan sendiri dalam mengakhiri kekerasan LRA.

Setelah dilakukan Perjanjian Penghentian Permusuhan atau *Cessation of Hostilities Agreement* (CoH), yang akhirnya ditandatangani pada 26 Agustus 2006, maka pejuang LRA berkumpul untuk pertama kalinya di dua lokasi pertemuan yang disetujui yaitu di Sudan selatan, negara yang telah meyakinkan perjalanan yang aman (memediasi pemerintah Uganda dan LRA).

³ Neema Seguya, Tesis, *Challenges in Conflict Resolution: Case of The Juba Peace Talks in Uganda (2006-2008)*. Centre for Peace Studies, University of Tromsø, Norwegia. 2010. Hal. 8.

Namun, dalam pelaksanaannya hanya berlangsung dalam waktu singkat dan LRA tersebar ketika berada di bawah ancaman militer dari pasukan militer Uganda (UPDF) melalui intimidasi, kebakaran, dan kemudian serangan helikopter tempur.

Kemudian dalam perjanjian yang baru itu, pihak pemerintah Uganda berkomitmen untuk menarik UPDF dari wilayah konflik, tapi LRA dan UPDF terus terjadi benturan konflik sampai pada tahun 2007. Sebelum perjanjian tambahan ditandatangani pada tahun 2007 yang memungkinkan perjalanan yang aman di sungai Nil, LRA bergerak ke daerah yang jauh dari zona pertempuran, diluar daerah larangan perjanjian CoH. Namun pada waktu yang sama, UPDF memindahkan pasukannya dan menyerang LRA dengan helikopter tempur setidaknya pada satu kesempatan tertentu. Kejadian ini telah resmi dikonfirmasi oleh Tim Pemantau Penghentian Permusuhan atau *Cessation of Hostilities Monitoring Team* (CHMT), yang terdiri dari anggota UPDF, SPLA, dan LRA tersebut, serta dari PBB.

Dengan demikian, melihat perjalanan perundingan *Juba Talks* yang tersendat pada awal tahun 2007, berarti bahwa situasi di Ekuatoria Timur memburuk secara signifikan karena serangan di semua sisi, termasuk aksi militer yang dikonfirmasi oleh LRA, UPDF, dan SAF tersebut. Pada awal tahun 2007, penduduk setempat dari Ekuatoria Timur juga menyampaikan keluhan baru tentang perilaku kasar, khususnya pelecehan dan penjarahan oleh pasukan SPLA yang ditempatkan di daerah tersebut. Sehingga, ketegangan antara kelompok etnis juga meningkat tinggi dan sering mengakibatkan kekerasan.

Karena situasi tidak jelas, dan perundingan dari LRA di Owiny-Kibul telah

menjadi tidak mungkin, sebuah perjanjian tambahan (addendum) baru dalam perjanjian CoH memungkinkan semua pejuang LRA menyeberangi sungai Nil untuk berkumpul di Nabanga, Ekuatoria Barat, dalam waktu enam minggu dari penandatanganan addendum itu pada 14 April 2007.

Rekomendasi untuk titik perundingan tunggal dibuat oleh CHMT di akhir Januari. Tapi informasi tentang serangan LRA di Ekuatoria Barat dan kelompok penentang didalam Republik Afrika Tengah (CAR) masih membingungkan dan sering bertentangan. Masalah yang belum terselesaikan dari lokasi pembicaraan damai pada awal tahun 2007, untuk memerintahkan komando tinggi LRA agar menarik diri dari yang ditunjuk sebagai area perundingan di Western Ekuatoria.

Dengan demikian itu, selanjutnya LRA menolak untuk melanjutkan perundingan perdamaian di Juba pada Januari 2007, dengan mengutip masalah keamanan, mediasi yang sulit, dan perlakuan tidak adil sebagai keprihatinan utama mereka. Dalam pernyataan rinci, LRA juga mengeluhkan keraguan kredibilitas delegasinya, keaslian, dan kekuatan negosiasi yang merupakan yang menjadi tujuan utama mediasi itu. Dengan posisi seperti itu menyebabkan *deadlock* dari Januari sampai April 2007. Pada awalnya, penolakan LRA untuk kembali ke perundingan di Juba dilihat sebagai bukti kurangnya komitmen untuk pembicaraan damai, namun penjelasan rinci berikutnya LRA mengubah pandangan tersebut.

Perundingan damai dilanjutkan pada tanggal 2 Mei 2007 dan menyepakati penandatanganan Perjanjian Solusi Komprehensif. Dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah Tanzania, Afrika Selatan,

Kenya, dan Mozambik, selain itu juga beberapa pengamat Uni Afrika sejak membentuk CHMT. Perundingan ini adalah pertama kalinya bahwa LRA telah menjadi kelompok yang terlibat dalam dialog berkelanjutan dengan pemerintah Uganda, dengan dihadiri aktor-aktor internasional, dan dengan perwakilan dari masyarakat di Sudan dan Uganda.

Pembicaraan itu dimediasi lagi oleh pemerintah Sudan Selatan, tetapi dengan dukungan dari PBB dan difasilitasi oleh logistik dari Kantor untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), di bawah kepemimpinan Eliane Duthoit.⁴ Kemudian, dilanjutkan pada tanggal 29 Juni 2007, pihak-pihak terkait sepakat dengan prinsip-prinsip tentang bagaimana keadilan dan rekonsiliasi akan digunakan, yang merupakan poin ketiga dari lima agenda yang disepakati dalam *Juba Talks*.

Pada bulan November 2007, delegasi LRA yang dipimpin oleh Martin Ojul berangkat ke Kampala untuk menyajikan kembali komitmen mereka untuk resolusi konflik secara damai. Namun, muncul laporan bahwa wakil komandan LRA Otti telah dieksekusi pada sekitar 8 Oktober 2007 setelah diduga berebut kekuasaan internal dengan Kony. Sehingga, pada 20 Desember 2007, pemerintah Uganda menetapkan ultimatum untuk pembicaraan damai dengan menyimpulkan perundingan damai dilanjutkan pada 31 Januari 2008, serta mengancam akan mengadakan serangan militer baru lagi. Kematian Vincent Otti, dikonfirmasi pada pertengahan Januari 2008,

⁴ Irin News Report, *Sudan-Uganda: LRA Talks, Pencils and Helicopters*. The Office for the Coordination and Humanitarian Affairs (OCHA). Juba, 31 May 2007. Di akses dari: <http://www.irinnews.org/report/72489/sudan-uganda-lra-talks-pencils-and-helicopters> Pada 13 Maret 2014.

sehingga akan mengancam keberhasilan perundingan yang sedang berlanjut.

Proses negosiasi lanjutan baru tercapai pada tanggal 3 Februari 2008 yaitu tentang akuntabilitas dan rekonsiliasi. Kesepakatan itu ditandatangani pada 19 Februari 2008 yang memutuskan bahwa kejahatan perang akan diadili di bagian khusus dari Pengadilan Tinggi Uganda, sehingga melewati wewenang ICC dan juga menghilangkan salah satu hambatan terakhir untuk Kesepakatan Perdamaian Akhir (FPA). Namun, pada tanggal 22 Februari 2008, kelompok LRA keluar dari perundingan lagi setelah ditolak untuk menduduki posisi senior di pemerintahan. Namun, tidak lama kemudian mereka menandatangani terobosan lain dari kesepakatan yang menurut mereka akan dipertimbangkan untuk jabatan pemerintahan dan tentara, tetapi tidak secara otomatis diangkat.

Kemudian, setelah menandatangani perjanjian damai yang komprehensif tersebut, maka diberlakukan perjanjian selanjutnya yakni tentang Perjanjian Gencatan Senjata Permanen yang disepakati pada 23 Februari 2008. Namun, bahkan lebih banyak masalah muncul pada tanggal 28 Februari 2008. Dikarenakan para pemberontak menuntut pencabutan dari dakwaan ICC sebelumnya, tapi pemerintah Uganda hanya ingin meminta PBB untuk melakukan itu setelah pemberontak didemobilisasi. Sehingga, poin terakhir tentang Kesepakatan Perlucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi ditandatangani pada tanggal 29 Februari 2008, yang merupakan penandatanganan perjanjian damai sebagai terakhir.

Sementara itu juga, gencatan senjata diperpanjang hingga 28 Maret 2008, dan perundingan damai akhir (FPA) dilanjutkan

pada 12 Maret 2008. Mengingat pada tanggal 12 Maret 2008, sebagai pembicaraan akhir yang akan terus berlanjut, ICC bertanya mengenai definisi yang tepat dari kekuatan pengadilan kejahatan perang pemerintah Uganda yang diusulkan, dalam sebuah langkah yang dilihat sebagai pelunakan dakwaan pada pemberontak LRA. Penandatanganan Perjanjian Damai Akhir (FPA) ditunda pada tanggal 26 Maret 2008, dari 28 Maret 2008 sampai dengan 3 April 2008.

Sementara itu gencatan senjata secara tidak resmi diperpanjang dengan batas waktu tersebut, kedua belah pihak diharapkan untuk terus mengikutinya. Penandatanganan kemudian lebih lanjut ditunda hingga 5 April 2008. Kemudian lagi, Kony menunda penandatanganan Perjanjian Damai Akhir (FPA) lebih lanjut pada tanggal 10 April 2008, dilaporkan meminta informasi lebih lanjut tentang jenis hukuman yang akan dia hadapi. Kemudian menjelaskan bahwa ia ingin mengetahui rincian lebih lanjut tentang bagaimana, keadilan tradisional Acholi akan digunakan, dan bagaimana sebenarnya divisi khusus dari Pengadilan Tinggi akan bekerja. Ia kemudian menangguk pembicaraan perdamaian dan menunjuk tim negosiasi yang baru, ia mengaku telah disesatkan.⁵

Meskipun perjalanan menuju perundingan *Juba Talks* terhambat dan sempat terhenti, negosiasi itu secara bertahap akhirnya juga menjadi proses yang terstruktur resmi, dapat dilihat dengan

⁵ Sudan Tribune, *Ugandan Rebels Suspend Peace Talks, Appoint New Team*. Ri-Kwangba, Sudan, Tanggal 10 April 2008. Diakses dari: <http://www.sudantribune.com/spip.php?article26715> Pada 14 Maret 2014.

adanya penandatanganan lima agenda⁶, yaitu:

- I. Perjanjian Penghentian Permusuhan (26 Agustus 2006)
- II. Perjanjian Solusi Komprehensif (2 Mei 2007)
- III. Perjanjian Akuntabilitas dan Rekonsiliasi (29 Juni 2007)
- IV. Perjanjian Gencatan Senjata Permanen (23 Februari 2008)
- V. Perjanjian Perlucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi (29 Februari 2008)

Setelah melalui beberapa tahap tersebut, akhirnya perundingan itu menyimpulkan sebuah Perjanjian Damai Akhir (FPA) pada bulan April 2008, yang harus ditandatangani oleh para pemimpin dari sisi negosiasi tersebut. Akan tetapi, pemimpin LRA Joseph Kony, pada dua kesempatan nyatanya gagal hadir untuk penandatanganan perjanjian perdamaian pada akhir bulan April dan Mei 2008.⁷ Hal ini dikarenakan, Kony merasa keamanannya dan kelompok belum sepenuhnya dijamin oleh pihak-pihak dalam negosiasi maupun internasional.

Karena pembicaraan *Juba Talks* antara Uganda dan LRA mulai pada tahun 2006, untuk sementara waktu perdamaian telah kembali di Uganda utara. Namun, kegagalan LRA untuk menandatangani Perjanjian Akhir (FPA), menyimpulkan selama pembicaraan Juba, dan serangan berikutnya oleh Tentara Uganda (UPDF) di markas LRA di Garamba National Park, DRC, mengakhiri upaya untuk menemukan solusi damai terhadap konflik pada

⁶ Mareike Schomerus dan Betty Acan Ogwaro, *Searching for solutions in Juba: an overview*, Conciliation Resources, 2010. Hal. 10.

⁷ Neema Seguya, 2010. *Op.cit.* Hal. 12.

Desember 2008. Meskipun wilayah Uganda utara tetap tenang dan damai, LRA masih membunuh dan menculik warga sipil di bagian RDK, CAR dan Sudan Selatan.

Sehingga, pada Desember 2008, reaksi pemerintah Uganda, Kongo dan Sudan Selatan dengan dukungan dari Amerika Serikat melakukan operasi militer terhadap LRA. Operasi militer tersebut dikenal dengan *Operation Lightning Thunder*, seperti yang disebut sebagai rencanakan yang buruk dan berakhir gagal sebagai upaya untuk mengejutkan para pemberontak. Karena, LRA menjawab dengan reaksi memerintahkan serangan besar-besaran terhadap warga sipil di Kongo setelah dilaksanakannya operasi militer tersebut.

Proses Menangani Pemberontakan LRA (*Lord's Resistance Army*)

1. Tindakan dan Kerjasama Uganda dengan Negara-negara Perbatasannya

- Operation North

Pada tahun 1991, sementara itu LRA yang masih tetap berbasis di wilayah Acholi etnis utara Uganda, maka pemerintah Uganda melancarkan operasi militer yang dikenal dengan *Operation North*. Operasi militer ini dimaksudkan untuk memotong dukungan kepada LRA dari penduduk setempat. Sebagai bagian dari tindakan ofensif itu, dibentuk milisi bela diri lokal, yang dikenal sebagai "Arrow Boys and Rhino". Kelompok yang diciptakan untuk melindungi masyarakat lokal dari pemberontakan LRA. Karena kekhawatiran pemerintah Uganda bahwa milisi pertahanan diri Acholi bisa saja menggunakan senjata untuk memberontak melawan pemerintah, mereka dilengkapi dengan hanya busur, panah, dan senjata tradisional lainnya.

Operasi militer tersebut tetap beroperasi terhadap LRA dari Uganda utara, sementara itu kekejaman LRA terhadap masyarakat Acholi terbukti tidak melayani kepentingan lokal. Pemerintah Uganda juga memutuskan untuk merelokasi semua warga sipil utara untuk pengungsian. Keputusan ini mengakibatkan perpindahan dan kemiskinan sekitar 200.000 orang Uganda utara. Sehingga, berdampak pengungsi yang menerima sedikit bantuan dan masih kekurangan perlindungan dari serangan LRA. Banyak Acholis percaya bahwa Kampala (pemerintah) hanya mementingkan perangnya dengan LRA sebagai alasan untuk mencuri tanah mereka.⁸

- Operation Iron Fist

Diantara operasi militer yang telah dilakukan Uganda selanjutnya adalah *Operation Iron Fist* berlangsung tahun 2002, hal ini merupakan respon dari besarnya perkembangan LRA di Uganda. Ditambah lagi, operasi militer tersebut dilaksanakan setelah pemerintah Sudan (Khartoum) waktu itu telah memutuskan segala bantuan untuk kelompok LRA, dan adanya izin yang diberikan Sudan untuk memasuki wilayah Sudan selatan untuk memberantas kelompok LRA. Operasi ini terdiri atas 10.000 pasukan, dan telah berhasil melumpuhkan beberapa anggota dan markas-markas kecil LRA.

Sampai dengan tahun 2004 sejak operasi tersebut dijalankan, Menteri Pertahanan Uganda Amama Mbabazi mengatakan bahwa pasukan militer telah membunuh sebanyak 928 anggota kelompok LRA dari tahun 2003 sampai tahun 2004. Meskipun demikian, *Operation Iron Fist*

⁸ Andre Le Sage. *Countering the Lord's Resistance Army in Central Africa*. Institute for National Strategic Studies. 2011, hal. 5.

telah melumpuhkan LRA dalam segi jumlah, akan tetapi operasi tersebut tidak mampu menangkap satupun anggota senior dari LRA, dan yang menjadi komando utama dari LRA itu sendiri. Bahkan, dampak dari operasi tersebut juga adalah penyebaran LRA ke wilayah-wilayah sekitar Uganda.⁹

Demikian juga, bahwa operasi militer itu memicu lebih intens serangan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok LRA, dan membuat penyebaran kembali LRA dari Uganda utara ke Sudan selatan. Dapat dikatakan bahwa operasi itu secara dramatis meningkatkan jumlah pengungsi dan gagal untuk mengakhiri perang. Pada puncak konflik, diketahui hampir 2 juta penduduk Uganda utara yang tinggal di kamp-kamp pengungsi akibat dari konflik tersebut.

- *Operation Lightning Thunder*

Dengan adanya serangan maupun operasi militer yang digencarkan oleh pemerintah Uganda terhadap posisi LRA, terutama pasca *Operation Iron Fist*, maka LRA pertama menggeser basis operasinya ke Garamba National Park, Kongo yang dimulai pada tahun 2005. Karena adanya perang saudara dan perang regional serta kurang stabilnya pemerintahan, maka Negara Kongo (RDK) dipandang LRA adalah basis yang tepat sebagai perlindungan bagi kelompok-kelompok bersenjata termasuk kelompok LRA. Oleh karena itu, LRA tidak menyerang orang-orang Kongo sampai September 2008.

Oleh karena itu juga, maka LRA dan pemimpinnya Kony mulai membuka negosiasi untuk perdamaian. Dan keinginan Kony tersebut disambut baik oleh pemerintah Uganda, dengan menerima rencana perundingan. Juba Talks merupakan

negosiasi antara kelompok LRA dan pemerintah Uganda, yang dimediasi oleh wakil Presiden Sudan Riek Machar, yang berlangsung dari bulan Juni 2006 di wilayah Sudan Selatan.

Dengan demikian, *Juba Talks* pertama menghasilkan sebuah gencatan senjata pada September 2006. Kony menggunakan taktik yang berbeda dibalik negosiasi itu, yakni agar gempuran militer dapat dihentikan untuk sementara, dan waktu tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan penyebaran terhadap negara-negara tetangga (wilayah perbatasan). Terbukti, negosiasi Juba Talks mengalami hambatan dan gagal lagi.

Sehingga akibatnya pada bulan Desember 2008, tentara Uganda, Republik Demokratik Kongo (RDK), dan Sudan selatan meluncurkan *Operation Lightning and Thunder*, ini merupakan serangan militer bersama melawan LRA di timur laut Kongo. Meskipun serangan untuk melemahkan LRA dengan memotong stok makanan dan perlengkapan lainnya, serta juga menghancurkan beberapa kamp pemberontak utama, namun masih gagal dalam tujuan akhirnya yakni menangkap pemimpin senior LRA. Sebaliknya, LRA telah tersebar di luas didaerah berbahaya di wilayah RDK. Bahkan, sebagai balasan atas serangan tersebut dan untuk bertahan hidup dalam pelarian, maka LRA meluncurkan serangkaian serangan kejam terhadap warga sipil di Kongo timur laut dan selatan Sudan.

Menurut *Human Rights Watch*, pada bulan Desember 2008 dan Januari 2009, LRA secara brutal menewaskan lebih dari 865 warga sipil dan menculik sedikitnya 160 anak-anak di bagian timur Kongo. Bahkan, sejak September 2008, lebih dari 180.000 orang di Kongo telah mengungsi akibat serangan LRA, serta 60.000 lainnya di

⁹ *Ibid.*

Sudan selatan.¹⁰ Kelompok LRA tetap membuat destabilisasi yang signifikan di provinsi Orientale dan ancaman yang akut bagi warga sipil. Meskipun upaya operasi militer telah dilakukan, namun pemerintah untuk menangkap pemimpin tinggi LRA masih tidak berhasil.

2. Tindakan dan Respon Uni Afrika

Uni Afrika (*African Union*) merupakan salah satu organisasi regional yang ada hingga kini. Sama dengan organisasi regional lainnya, Uni Afrika memiliki tujuan sebagai asistensi kepentingan nasional negara-negara yang khusus kepada negara-negara yang ada di Benua Afrika. Uni Afrika awalnya dibentuk tahun 1963 dengan nama OAU (*Organization of African Unity*), dan memiliki dasar yang sama dengan ASEAN yaitu Non-Interference atau tidak boleh melakukan intervensi terhadap kedaulatan negara-negara Afrika. OAU kemudian banyak mendapatkan kritikan atas dasar tersebut, karena pada akhirnya tidak berkontribusi banyak terhadap berbagai pelanggaran HAM yang ada di Afrika.¹¹

Namun, OAU kemudian dirubah menjadi AU (*African Union*), yang dibentuk tanggal 9 Juli 2002. Jumlah keanggotaan Uni Afrika di tahun 2002 sebanyak 52 negara. Perbedaan mendasar dari OAU dan Uni Afrika ini adalah, Uni Afrika mengenali adanya hak intervensi atas dasar kemanusiaan.¹²

¹⁰ Enough Project, *Roots of the Crisis: The LRA in the Congo and South Sudan*. Diakses dari: http://www.enoughproject.org/conflict_areas/lra/roots-crisis Pada 16 Maret 2014.

¹¹ Paul D. Williams, *Enhancing Civilian Protection in Peace Operations: Insights from Africa*. The Africa Center for Strategic Studies, 2010. Hal. 8.

¹² *Ibid*.

Kasus yang terjadi di Uganda sejak tahun 1987 juga telah masuk dalam radar perhatian Uni Afrika, dimana sebuah kelompok pemberontakan yang disebut *Lord's Resistance Army* (LRA) telah melakukan banyak pelanggaran HAM dalam usaha memperjuangkan kaum Acholi. Uni Afrika menganggap kasus LRA sebagai kasus yang sangat penting. Pengaruh LRA dan mobilisasi yang cepat oleh LRA telah membawa penyebaran LRA di 4 negara, yakni Republik Demokratik Kongo (RDK), Sudan Selatan, Uganda, hingga negara Republik Afrika Tengah.

Pentingnya pemberantasan kelompok LRA yang menjadi latar belakang ketegangan Uni Afrika dalam menghadapi kelompok pemberontak ini. Dewan Keamanan PBB memberikan mandat kepada badan UNOCA (*United Nations Regional Office on Central Africa*) untuk menegosiasikan sebuah resolusi keamanan agar Uni Afrika melaksanakan sebuah inisiatif kolektif dalam pemberantasan kelompok LRA.¹³

Dan kemudian UNOCA berhasil menegosiasikan kepada Uni Afrika akan sebuah tindakan kolektif menghadapi ancaman LRA. Namun, tindakan tersebut baru dilakukan pada bulan Maret 2012. Uni Afrika mengumumkan sebuah tindakan keamanan kolektif yang disebut sebagai *African Union Regional Cooperation Initiative* (Inisiatif Kooperasi Regional Uni Afrika). Tindakan ini merupakan sebuah upaya pemberantasan LRA yang pada umumnya terdiri atas 5,000 pasukan dibawah sebuah komando Uni Afrika.

Tujuan dari *African Union Regional Cooperation Initiative* adalah untuk

¹³ BBC News, *African Union Force Steps Up Hunt for Joseph Kony*. Diakses dari: <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17498382> Pada 18 Maret 2014.

mewujudkan penghapusan LRA, yang mengarah pada penciptaan lingkungan yang aman dan stabil di empat negara yang terkena dampak LRA tersebut. Kegiatan LRA tetap menjadi ancaman serius bagi perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan itu, dengan banyak konsekuensi kemanusiaan. LRA terus melakukan kekejaman terhadap warga sipil, khususnya anak-anak dan perempuan, termasuk penculikan, pembunuhan, mutilasi, pembakaran dan penjarahan desa, serta merusak mata pencaharian. Hal ini mengakibatkan perpindahan besar-besaran pengungsi dan krisis kemanusiaan yang akut.

3. Resolusi-Resolusi DK PBB Terhadap Kelompok LRA

Konflik Uganda dan kelompok LRA yang telah menelan banyak korban, menjadi perhatian masyarakat internasional tidak terkecuali PBB yang menyatakan bahwa konflik tersebut merupakan masalah internasional. Melihat buruknya situasi dan kondisi yang ada disana, membuat PBB untuk ikut campur dalam penyelesaian masalah tersebut. Pada tahun 2008, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan berdasarkan dengan resolusi.

Resolusi-resolusi tersebut dikeluarkan dengan tujuan agar pemerintah Uganda dan LRA segera mengambil langkah-langkah yang kongkrit untuk menyelesaikan konflik secepat mungkin. Penulis juga fokus terhadap resolusi keamanan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, sebab hanya Dewan Keamanan yang merupakan organisasi dengan kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah ancaman keamanan yang ada di dunia, termasuk masalah LRA yang memberikan ancaman langsung terhadap

beberapa negara anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Semua resolusi yang diterapkan memiliki tujuan untuk mengurangi dan pada akhirnya memberantas secara keseluruhan pengaruh LRA yang semakin meluas masa kepemimpinan Museveni di Uganda. Bahkan, kelompok LRA menyebar di berbagai Negara perbatasan Uganda seperti: Sudan, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah. Beberapa resolusi yang telah diterapkan dari tahun 2008 hingga 2012 adalah *Resolusi 1812* (tahun 2008), *Resolusi 1991* (tahun 2011) dan *Resolusi 1996* (tahun 2011).

Resolusi 1812 tersebut diadopsi oleh Dewan keamanan PBB pada tanggal 30 April 2008. Dewan Keamanan PBB menambahkan LRA dalam resolusi tersebut, setelah kegagalan dari *Juba Talks* tahun 2008 dan dengan adanya serangan dari LRA yang terjadi pada Desember 2008 yang menewaskan lebih dari 400 warga sipil.¹⁴ Dalam resolusi ini, Dewan Keamanan PBB memberikan perintah kepada misi militer perdamaian yang berada di Sudan terhadap perluasan mandat UNMIS di tahun 2008, untuk mengikutsertakan ancaman yang dihadapi terhadap kelompok LRA. Pasca beberapa kejadian yang menewaskan ratusan rakyat akibat LRA, Dewan keamanan PBB kemudian menghasilkan resolusi yang tegas dalam menanggapi masalah tersebut. Yang mana pada saat lahirnya mandat ini, kelompok LRA sedang melakukan berbagai tindakan kekerasan di Sudan.

Resolusi 1991 diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Juni 2011. Resolusi ini memberikan fokus terhadap

¹⁴ United Nations Security Council, *Resolution 1812 (2008)*. Diadopsi dari Sidang Dewan Keamanan Ke-5882 Pada 30 April 2008, United Nations: New York, 2008. Hal. 1.

situasi keamanan yang terjadi di Republik Demokratis Kongo. Inti dari resolusi 1991 yang pertama adalah perpanjangan terhadap mandat MONUSCO (*United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*) yang diperpanjang hingga 30 Juni 2012, dengan mandat utama memberikan asistensi kepada pemerintahan Republik Demokratis Kongo, dan memberikan perlindungan kepada warga sipil.¹⁵ Dalam Resolusi 1991 ini juga menjelaskan tentang ancaman LRA terhadap keamanan warga sipil.

Resolusi 1996 diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 9 Juli 2011.¹⁶ Secara umum, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1996 ini menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Dewan Keamanan, Sudan, dan Sudan Selatan dalam menjalani transisi pemerintahan yang dihasilkan dalam referendum beberapa bulan yang lalu waktu itu. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1996 memberikan beberapa penjelasan tentang cara mengatasi kelompok LRA yang juga telah tersebar ke wilayah Sudan selatan di tahun tersebut.

Dengan demikian itu, ketiga resolusi-resolusi diatas merupakan resolusi keamanan yang memiliki peran untuk mengarahkan Dewan Keamanan dan dunia internasional terhadap respon yang tepat dalam menghadapi LRA. Meskipun tidak memiliki detail yang cukup tentang mekanisme pemberantasan, namun Dewan Keamanan telah menggunakan resolusi-

resolusi tersebut. Yang digabungkan dengan resolusi-resolusi sebelum tahun 2008, untuk mengetahui secara umum cara pemberantasan LRA tersebut. Dan juga, resolusi ini disesuaikan dengan keberadaan dinamis kelompok LRA di wilayah Afrika dalam empat Negara-negara yang berbeda.

Sejak tahun 2008 hingga 2011, terlihat kesulitan dari keadaan di atas. LRA mampu bertahan lama, sebab ruang gerak yang mereka miliki masih sangat luas. Ketika pemerintah Uganda menyatakan perang melawan LRA, kendala terbesar Uganda adalah saat LRA mempercepat laju dan menyebar ke banyak wilayah. Jumlah pasukan perdamaian PBB yang terbatas, dan mandat sebagai penjaga perdamaian saja, menjadi alasan mengapa perang melawan LRA tidak bisa maksimal, berhubung besarnya kemungkinan untuk memperluas jangkauan dan ruang gerak LRA itu sendiri.

Simpulan

Perkembangan politik di Uganda telah berkembang seiring pergantian beberapa kekuasaan pemerintah, mulai dari demokrasi parlementer untuk tahun kediktatoran dan juga kekuasaan militer, kemudian kembali lagi ke demokrasi parlementer. Sistem demokrasi sampai saat ini di Uganda, dapat dikatakan lebih sah daripada sistem parlementer asli pada masa protektorat Inggris. Hal itu karena rakyat Uganda mendapat kesempatan memilih langsung wakil-wakil dan memiliki suara dalam penciptaan konstitusi baru.

Negara Uganda adalah kisah sukses demokratisasi yang dipimpin oleh kepala negara sejak kekuasaan berada pada masa pemerintahan Museveni, dikarenakan ia mampu untuk tetap berkuasa setelah transisi ke pemilihan umum dilaksanakan. Uganda telah pulih secara politik dan berkembang

menjadi demokrasi yang sukses. Perkembangan politik di Uganda adalah sebuah contoh harapan bagi Negara Afrika lainnya yang masih terganggu dengan kekuasaan militer dan kediktatoran.

Jika rezim sebelumnya yang berkuasa di Uganda dicirikan oleh korupsi, sektarianisme dan ketidakmampuan untuk memulihkan ketertiban dan mendapatkan legitimasi rakyat maka Museveni harus menghindari pengulangan kesalahan-kesalahan ini apabila pemerintahannya tidak ingin mengalami nasib yang sama. Akan tetapi, masalah-masalah lama dan baru pun tidak dapat dihindarkan seiring periode masa pemerintahannya itu, termasuk masalah konflik di Uganda. Misalnya, di antara pemberontakan yang berbeda dalam pemerintahan Museveni adalah Tentara Perlawanan Tuhan atau LRA (*Lord's Resistance Army*) di Uganda utara.

LRA bukan kelompok pemberontak baru, melainkan kelompok ini merupakan kelanjutan dari kelompok-kelompok perlawanan sebelumnya seperti Tentara Demokratik Rakyat Uganda (UPDA), dan Gerakan Roh Kudus (HSM). Memahami alasan gagalnya perundingan damai *Juba Talks* 2006-2008 antara Pemerintah Uganda dan LRA, karena itu memerlukan seorang pemimpin yang memiliki latar belakang pengetahuan tentang penyebab konflik LRA, berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik, dan mengapa upaya ini gagal mengakhiri konflik tersebut.

Meskipun, berbagai macam perjanjian perdamaian telah disepakati oleh kedua pihak, namun tidak pernah mampu terealisasi. Adanya kecenderungan salah satu pihak tidak melaksanakan hasil perundingan dan kesepakatan yang membuat kontribusi dalam perpanjangan konflik sampai waktu yang begitu lama. Sebuah

perjanjian tahun 2006 menghasilkan gencatan senjata, dan memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk melakukan perundingan damai, demi terciptanya keamanan dan ketenteraman rakyat Uganda maupun internasional.

Adanya keikutsertaan Uni Afrika dalam menyelesaikan masalah di wilayah Uganda menandakan bahwa masalah yang disebabkan pemberontakan LRA adalah masalah serius. Untuk itu, peranan organisasi regional Afrika ini merupakan tindakan positif untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Walaupun pada akhirnya lembaga ini tidak sepenuhnya mampu untuk mencegah dan menangani masalah pemberontakan serta konflik dengan pemerintah Uganda.

Bahkan, ditambah lagi adanya resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang merupakan bentuk perhatian dunia internasional dalam menanggapi masalah pemberontakan kelompok LRA itu. Walaupun, sebenarnya resolusi itu diadakan melalui perpanjangan mandat dari beberapa misi militer perdamaian sebelumnya. Namun, hal demikian itu menunjukkan adanya keterlibatan internasional dikarenakan melihat masalah tersebut sangat serius dan merugikan banyak orang serta mengakibatkan korban jiwa yang tidak terhitung lagi.

Akan tetapi demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam penyelesaian masalah pemberontakan LRA tersebut. Mulai dari penyelesaian pemberontakannya di wilayah Negara Uganda, dimana kelompok tersebut lahir, kemudian mengakibatkan penyebaran operasi wilayah yang berbeda ke berbagai Negara di Afrika seperti: Sudan, Republik Demokratik Kongo (RDK), dan Republik Afrika Tengah (CAR). Sehingga, dengan begitu proses

penyelesaian pun terhambat dan bahkan mengalami beberapa kegagalan.

Oleh karena itu, penulis membuat kesimpulan dalam tulisan ini yaitu berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok LRA belum dapat terselesaikan selama masa kepemimpinan presiden Museveni di Uganda periode tahun 2006 hingga 2011. Baik itu di negaranya sendiri, Uganda, ataupun Negara-negara yang terkena dampak penyebaran kelompok LRA itu. Untuk itu pula, penulis berpendapat bahwa untuk menyelesaikan konflik dan pemberontakan LRA ini, perlu adanya kekuatan kolektif yang dilakukan oleh empat Negara yang diduduki oleh kelompok LRA tersebut.

Ditambah lagi, dukungan yang kongkrit dari organisasi internasional dan regional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Afrika. Karena penyebab dan konsekuensi dari perang berkepanjangan ini, tidak dapat dilihat sebagai masalah eksklusif Acholi yang bergantung pada Uganda saja. Namun juga harus dilihat sebagai krisis kemanusiaan. Hal ini memiliki banyak dimensi: politik, sosial, ekonomi dan kemanusiaan. Dengan demikian, solusi yang tepat dan cepat harus segera dapat ditemukan oleh semua pihak yang menangani masalah pemberontakan kelompok LRA tersebut.

Daftar Pustaka

Branch, Adam. *Displacing Human Rights: War and Intervention in Northern Uganda*. Oxford University Press Inc: New York, 2011.

Burchill, Scott dan Andrew Linklater. 1996. *(Terjemahan) Teori-teori Hubungan Internasional*. Nusamedia: Bandung.

Burton, John. *Conflict: Resolution and Prevention*. London: MacMillan Press, 1990.

Hermawan, Yulius P. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007.

Le Sage, Andre. *Countering the Lord's Resistance Army in Central Africa*. Institute for National Strategic Studies, 2011.

Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Ed. Jakarta: LP3ES.

Miall, Hugh. (et.al.). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah Melola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras terj.* Tri Budhi Sastrio (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

Mwebaza, Rose. *Sustaining good governance in water and sanitation in Uganda*. Institute for Security Studies. 2010.

Nuchterlein, Donald E. *The Concept of National Interest: A Time For New Approach*. ORBIS, London and New York.

Phuong Pham, Patrick Vinck dan Eric Stover. *The Lord's Resistance Army and Forced Conscription in Northern Uganda*. Berkeley-Tulane Initiative on Vulnerable Populations. 2007.

Ramsbotham, Oliver, Tom Woodhouse dan Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution; Third Edition*, Polity Press, Cambridge, 2011.

Schomerus, Mareike. *The Lord's Resistance Army in Sudan: A History and Overview*. Graduate Institute of International Studies, Geneva. 2007.

- Suryokusumo. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- The Republic Of Uganda. *General National Health Accounts 2008-2009 and 2009-2010*. Ministry Of Health, Uganda. 2013.
- Williams, Paul D. *Enhancing Civilian Protection in Peace Operations: Insights from Africa*. The Africa Center for Strategic Studies, 2010.
- Agger, Kasper. 2012. *The End of Amnesty in Uganda: Implications for LRA Defections*. Diakses dari: <http://www.enoughproject.org/files/GuluDispatch.pdf> Pada 14 September 2013.
- Finnstrom, Syerker. 2012. *Humanitarian Death and the Magic of Global War in Uganda*. Diakses dari: <http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:383500/FULLTEXT03.pdf> Pada 15 September 2013.
- Beyond Juba. *Peace Agreements*. Diakses dari: http://www.beyondjuba.org/BJP1/peace_agreements.php Pada 20 Maret 2014.
- LRA Crisis Tracker. *LRA Commanders: Joseph Kony*. Diakses dari: <http://www.lracrisistracker.com/command/joseph-kony> Pada 20 Maret 2014.